

JURNAL
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG BILYET GIRO
DALAM HAL PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Anggi Febriando

NIM. 0710113050



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

ABSTRAKSI

Anggi febriando, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2013, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong, Siti Hamidah SH.MM, Djumikasih SH. M.Hum

Penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong. Dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong, dari permasalahan ini penulis mencoba menganalisis berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan pemegang bilyet giro kosong.

Adapun tujuan penulis mengangkat topik ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong sehingga dapat diketahui peraturan yang jelas memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan menganalisis Perundang-undangan dan peraturan-peraturan mengenai bilyet giro yang di analisis dari Undang-undang dan peraturan-peraturan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Adanya kejelasan terhadap perlindungan terhadap pemegang bilyet giro ini memberikan kejelasan bagaimana hukum melindungi setiap pemegang bilyet giro kosong, sehingga diharapkan masyarakat percaya terhadap perbankan dan tidak takut menggunakan surat berharga dalam setiap transaksi keuangan.

Di akhir diharapkan perlunya peraturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong dengan adanya aturan yang memberikan perlindungan terhadap setiap pemegang bilyet giro kosong.

Kata kunci : Bilyet Giro kosong

ABSTRACT

Author discusses the form of legal protection of shareholders giro empty. In various laws and regulations do not expressly regulate the protection holder giro empty, from the author tries to analyze this problem various rules pertaining to the protection holder giro empty.

The purpose of the authors raise this topic to determine the form of legal protection for holders of bank draft empty so it can be clear rules provide protection against the blank holder giro.

Type of research by the author are normative legal research, because the author will analyze legislation and regulations regarding bank draft in the analysis of laws and regulations. While the approach used is the statutory approach.

Results are expected to find clear rules regarding the protection of holders giro empty. Lack of clarity on the protection of the holders of a bank draft made it clear how the law protects each holder giro empty, so expect public confidence in the banking system and not afraid to use the securities in any financial transaction.

Expected at the end of the need for clear rules regarding the protection of the blank holder with a bank draft rules that provide protection against any holder giro empty.

PENDAHULUAN

Zaman modern sekarang ini membawa dampak segala sesuatu diselesaikan dengan cepat mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia usaha dan perdagangan. Sistem pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank. Dengan memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yakni dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan bilyet giro.

Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral. Dalam hal ini dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang dapat diuangkan.

Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen¹

Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan).

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung, 2003, Hal. 224.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet giro menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan-ketangan maupun endorsemen.

Bilyet Giro yang sudah dirasa aman tidak seperti cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan bilyet giro kosong. Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995). Pembatalan karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau dipegang oleh pemegang dan merugikan pemegang bilyet giro.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral². Untuk mengatasi hal inilah maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro

Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan bilyet giro adalah bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Secara yuridis formal, bilyet giro ini belum ada Undang-undang yang mengatur tentang bilyet giro, hanya pedoman atau pengaturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu SEBI No. 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam SEBI ini ditegaskan mengenai Bilyet Giro secara khusus. Bilyet giro tidak lain dari surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk

² *Ibid.*, hal 223

memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang sama atau pada bank lainnya³.

Dalam pemakaian surat berharga di kalangan para pedagang atau pengusaha lebih menyukai pembayaran melalui surat berharga yang dapat diuangkan. Artinya, walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga dengan uang tunai sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat diatasi. Surat berharga yang dimaksud itu ialah bilyet giro. Dalam lalu lintas pembayaran penggunaan bilyet giro ini sama dengan surat berharga yang lain yaitu surat wesel dan surat cek. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam dunia usaha masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadi penggunaan bilyet giro ini pembayaran sering terjadi dengan Bilyet Giro kosong.

Fakta yang terjadi pada 2009, “Mengutip data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia, penarikan cek dan bilyet giro kosong pada bulan februari 2009 mencapai 37.432 transaksi. Adapun nilai transaksi Rp 998,74 miliar . . . Nominal transaksi giro kosong mencapai Rp 684,22 miliar dengan volume transaksi mencapai 28.758 kali”⁴ Dari fakta yang terjadi bagi pemegang bilyet giro tidak dapat mendapatkan pemindahan dana dan diperlukan perlindungan hukum kepada pemegang bilyet giro kosong.

Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak memberikan secara terperinci bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro yang kosong Jadi yang menjadi latar belakang disini surat keputusan yang sudah ada sejak tahun 1995, dirasa kurang efektif untuk memberikan perlindungan bagi pemegang bilyet giro dan adanya ketidakjelasan dari surat keputusan yang terkait.

³ *Ibid.*, hal 224

⁴ Kompas.com 19 Maret 2009, Wah, Bilyet Giro dan Cek Kosong Meningkat,
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/03/19/11224715/Wah.bilyet.giro.da.n.cek.kosong.meningkat>. diakses 1 juni 2013.

Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong ?

METODE PENELITIAN

Penulisan untuk mencapai hasil optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong ini, sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma yang berlaku terhadap perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong. Jadi disini terdapat kekosongan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan pemegang bilyet giro kosong, kemudian membandingkannya peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Statute approach adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral penelitian. Penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil penelitian empiris, namun ilmu empiris itu

berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak merubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁵

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 jenis data, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro, Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong, Surat Edaran Bank Indonesia no 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tentang tata usaha cek atau bilyet giro kosong dan surat perjanjian pembukaan rekening giro yang berasal dari bank.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar “asas-asas hukum”, pandangan para ahli hukum “doktrin”, hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, artikel, pendapat para ahli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan PDIH Brawijaya Malang dan artikel yang berasal dari media elektronik, buku atau literatur tentang bilyet giro

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dipergunakan penulis yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

⁵ Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Bayumedia, Malang, Juli 2007, hal 302.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan yaitu dengan melihat, mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan, buku-buku dan mengakses melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya diolah dengan cara kualitatif, yaitu pengolahan data dengan cara menggunakan kata-kata dan kalimat sehingga diperoleh bahasa yang sistematis dan mudah dimengerti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penunjang. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Interpretasi Gramatikal (Menurut Bahasa)

Dalam penelitian ini digunakan interpretasi gramatikal karena membantu memahami teks berbagai aturan hukum yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong melalui pemahaman bahasa atau susunan kata-kata yang digunakan.

2. Interpretasi Sistematis

Dalam penelitian ini digunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum, karena tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner diperlukan dalam penelitian ini, karena dalam masalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong ini perlu diketahui dan membandingkan pandangan para pakar hukum dan berbagai macam disiplin ilmu.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Bilyet Giro Kosong di Indonesia

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya alasan yang menyebabkan bilyet giro ditolak oleh bank. Mengenai alasan penolakan bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 yang di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong. Syarat dalam cek bilyet giro ini di harapkan di dalamnya berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi pemegang, tetapi dalam syarat tersebut hanya mengatur persyaratan secara formal. Dalam SEBI tersebut disebutkan bahwa tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro atau cek yang di tujukan kepada tertarik apabila cek atau bilyet giro tidak memenuhi syarat alasan penolakan bilyet giro

KUHPer dan KUHD tidak mengatur mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-undang Perbankan, di dalamnya hanya memberikan pengertian dari bilyet giro. Bilyet giro secara khusus diatur dalam SEBI No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro. Dengan adanya surat edaran ini tidak pula mengatur memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Pada surat edaran ini pemegang tidak diberikan beberapa aturan yang melindungi pemegang, sehingga pemegang tidak dapat pemindahan uang ke rekening pemegang dan lebih sulit menerima pembayaran.

Dalam surat edaran yang ada hanya memberikan penjelasan jika seorang nasabah menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksi kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan.

Surat peringatan ini diberikan bersamaan dengan surat keterangan penolakan dan warkat bilyet giro yang ditolak kepada pemegang, untuk kemudian menjadi urusan antara pemegang dengan penerbit. Surat peringatan ini hanya memberikan penjelasan kepada penerbit untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali, sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap pemegang bilyet giro.

2. Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro di Indonesia

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menurut pasal 6 huruf a usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kewajiban penerbit terkait pembayaran (pemindahbukuan) kepada pemegang. Kewajiban lain saat penerbitan bilyet giro dimana penerbit melaksanakan syarat-syarat formal pada bilyet giro. Dengan pelaksanaan syarat formal mempermudah proses pemindahbukuan bilyet giro. Bagi bilyet giro yang tidak melaksanakan syarat formal dengan lengkap biasanya bank akan menghubungi penerbit untuk memastikan bilyet giro yang diterbitkannya.⁶

Dalam hal cukup atau tidaknya saldo penerbit dengan besarnya saldo yang ditulis dalam bilyet giro, bank mutlak wajib menolak. Dengan adanya kepercayaan bank, maka bank akan langsung mengkonfirmasi penerbit mengenai kekurangan dana. Adakalanya penerbit tidak mengetahui jumlah saldo yang tersedia dan tanggal efektif yang berlaku. Konfirmasi yang dilakukan oleh bank secara langsung ini akan mempercepat proses pemindahbukuan. Apabila saldo

⁶ Wawancara dengan Bpk. i Dewa Gde Putra, Asisten Manager Operasional di PT Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Ubud-Gianyar tanggal 5 oktober 2011

kosong ini tidak ada konfirmasi dari nasabah, bank akan langsung menolak bilyet giro tersebut dengan alasan saldo kosong.⁷

Menurut ketentuan pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang bilyet giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa, kecuali bilyet giro dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Berdasarkan ketentuan diatas, kewajiban penyedia dana timbul pada saat perintah bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, dengan demikian bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana rekening penarik (pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro). Sedangkan Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu tanggal penarikan dan tanggal efektif penarik diberi kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban untuk mengusahakan dan menyediakan dana.⁸

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong

3.a. Perlindungan Hukum yang di Berikan Oleh Peraturan Perundang-undangan

Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. Pihak penuntut disini adalah pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa:

1. Menyerahkan sesuatu barang;

⁷ Wawancara dengan Bpk. i Dewa Gde Putra, Asisten Manager Operasional di PT Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Ubud-Gianyar tanggal 6 oktober 2011

⁸ Muhammad Abdul Kadir, op. Cit Hal 236

2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Penyelesaian perkara sangat penting dibutuhkan peranan hakim dalam penyelesaian perkara secara damai. Dasar pemikiran upaya perdamaian adalah pencegahan kemungkinan timbulnya permusuhan antara pihak dikemudian hari karena putusan hakim akan menentukan pihak yang kalah dan pihak yang menang.

Timbulnya akibat dari keputusan hakim, maka para pihak diwajibkan menyerahkan sesuatu atau membayar sejumlah uang untuk memenuhi hukumannya dan apabila tidak dilakukan kewajiban tersebut akan dilakukan penyerahan barang secara paksa untuk memenuhinya. Hal lain perlu diketahui bahwa putusan perdamaian itu menurut ketentuan pasal 130 ayat 3 HIR tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

Penyelesaian perkara secara pidana mengenai bilyet giro "blanko" pemegang terakhir ini juga dapat mengajukan tuntutan pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Dapat disimpulkan bila seorang penerbit memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di pasal 378 KUHP

3.b. Perlindungan Hukum yang di Perjanjikan Perjanjian

Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan surat berharga sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga yang disebut perikatan dasar.

Perikatan dasar ini menjadi dasar dari terbitnya bilyet giro dan akan menjadi perjanjian yang sah antar kedua belah pihak. Perjanjian sah disini yaitu perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum (legally concluded contract). menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah:

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus) ;
2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);
3. Ada suatu hal tertentu (u certain subject matter);
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sah perjanjian tersebut, dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif mencangkup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan kausa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi, apabila keempat unsur tidak terpenuhi akan menyebabkan cacatnya perjanjian dan diancam batal (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

Salah satu perjanjian antara penerbit dan bank yang terdapat di dalam perjanjian pembukaan rekening giro tersebut adalah perjanjian pemberian kuasa, yaitu penerbit memberi kuasa kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening lain.

Surat berharga itu “pembawa hak” yang berarti ada hak yang melekat pada surat berharga itu. Pemegang bilyet giro berhak sebagai pihak yang meminta pemindahbukuan. Hal ini sesuai dengan fungsi surat berharga sebagai surat legitimasi yang membuktikan pemegang berhak atas isi tagihan dalam bilyet giro

Dalam surat perjanjian antara bank dengan penerbit rekening giro tidak memberikan ketentuan yang melindungi bagi pemegang bilyet giro. Ketentuan perjanjian yang tercantum pada perjanjian lebih kepada perjanjian antara bank dengan penerbit bilyet giro. Menurut surat perjanjian pembukaan rekening giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro kosong Bank BRI pada huruf G pemegang bilyet giro kosong hanya menerima pengembalian bilyet giro kosong dan Surat Keterangan Penolakan yang harus diselesaikan dengan penerbit.

3.c. Perlindungan Hukum Dalam Kasus yang Pernah Terjadi di Indonesia

Kasus pertama:

Perkara antara Hussein Iskandar sebagai penggugat melawan Abdul Kadir Mahmud sebagai tergugat. bahwa Tergugat asli ada berhutang/meminjam kepada Penggugat asli sebesar Rp.56.996.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing seperti tersebut dalam gugatan;

Bahwa akan tetapi pada saat Bilyet Giro tersebut akan jatuh tempo, Tergugat asli menghubungi Penggugat asli agar ke 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut jangan dimasukkan/*diclerringkan* pada Bank karena dananya masih kosong, hal mana Penggugat asli setuju. Bahwa meskipun Penggugat asli sering menagih pada Tergugat asli akan tetapi selalu diberikan janji-janji saja yang tidak ada kepastiannya sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat asli terurai di atas dapat dikwalifiser sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat asli; Bahwa kerugian *riel* yang diderita Penggugat asli disamping uang pokok tersebut juga kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan dari keuntungan, bilamana dipergunakan untuk modal usaha yang akan memperoleh keuntungan sebesar 10% setiap bulannya perbulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 sampai sekarang atau $10\% \times \text{Rp.56.996.000} \times 16 \text{ bulan}$, sebesar Rp.91.213.600,-;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi HUSSEIN ISKANDAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 Juli 1998 No.81/Pdt/1998/ PT.Smda. dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No.63/Pdt.G/1996/ PN.Bpp.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat uang sebesar Rp.56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing No.GA.150805 dan No.GA.150809 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya/pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp.56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang Rp.56.996.000,- tersebut sebesar 10% pertahun, sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sampai hutang tersebut dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kasus kedua

Bahwa Terdakwa Fredy Santoso Gunawan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa besi plat yang telah dipesan tersebut atas permintaan Terdakwa telah dikirim saksi korban ke alamat Jalan Kenjeran No. 510 F Surabaya sejumlah 1.038 lembar plat besi hitam senilai Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pesanan Terdakwa pada saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra tersebut telah diterima Terdakwa melalui karyawannya dengan bukti telah ditandatangani surat jalan ;

Bahwa setelah barang berupa plat besi hitam telah diterima Terdakwa, kemudian sekitar bulan April 2007, Terdakwa memberikan Bilyet Giro Bank Panin Nomor 100-b-971858 tanggal 10 Mei 2007 atas nama Fredy Santoso Gunawan pada saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan pada saat jatuh tempo, saksi Tjen Dedi Winata Chandra melakukan kliring di Bank BCA dan ternyata tidak ada dananya ; Bahwa selanjutnya saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra menghubungi dan melakukan penagihan pada Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa hanya diberikan janji-janji dan janji tersebut tidak pernah ditepati Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa yang mempunyai usaha tepung ikan sehingga membeli sejumlah besi plat hitam tersebut dengan maksud akan dipergunakan membuat mesin tepung ikan, dan dalam kenyataannya besi plat hitam tersebut tidak dipergunakan untuk membuat mesin tepung ikan akan tetapi dijual pada orang lain dengan harga yang murah dengan maksud mengambil uang tunai dari penjualan besi plat hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, yaitu Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Fredy Santoso Gunawan tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hukum memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro yang dirugikan karena tidak adanya pembayaran. Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa:

1. Menyerahkan sesuatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Apabila dalam hukum pidana dapat disimpulkan bila seorang penerbit memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di pasal 378 KUHP, yaitu:

1. bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
3. dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain;
4. untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
5. atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, maka ia dapat dikenakan tindak pidana penipuan.

Perbuatan yang dilakukan penerbit akan penerbitan bilyet giro kosong merupakan wanprestasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi atas penerbitan bilyet giro kosong putusan pengadilan menyatakan perbuatan penerbitan bilyet giro kosong sebagai wanprestasi ada pula perbuatan penerbitan ini sebagai tindak pidana penipuan.

Dari setiap kasus terlihat jelas bagaimana hakim memandang suatu kasus yang terjadi, sehingga yurisprudensi ini dapat dipakai untuk kedepannya. Jauh dari pada hal tersebut menurut pendapat pribadi saya bilyet giro sebagai surat berharga merupakan surat pengakuan hutang, jadi dapat dianalogikan ke surat berharga lain seperti cek kosong.

Dalam cek kosong menunjukkan lebih beratnya fokus pelanggaran terhadap penerbit dan tidak ada perlindungan terhadap pemegangnya, jadi disini diperlukan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro yang jelas sehingga pemegang tidak dirugikan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis bahana hukum dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro.

Aturan yang jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat dilihat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan. Hakim tetap memutuskan dan melihat apakah perlindungan tersebut dapat mengarah wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Hal ini diharapkan sehingga para pihak antar penerbit dan pemegang mengetahui akan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong ini.

2. SARAN

1. Bagi perbankan Indonesia diharapkan dapat memberikan perjanjian terhadap penerbit juga pemegang, karena dengan itu memberikan rasa percaya terhadap masyarakat akan fasilitas atau produk bank terhadap setiap nasabahnya.
2. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai surat berharga khususnya bilyet giro yang memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro.
3. Bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga khususnya bilyet giro, dengan adanya aturan yang jelas masyarakat dapat memakai bilyet giro dengan aman.

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elips, 1998, *Surat Berharga*, kerjasama Elips dan fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purwosutjipto, H.M.N, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1982, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1982 Yogyakarta
- Subekti, 2001, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cetakan XXIX, PT. Intermasa, Jakarta
- Suryohadibroto, Imam prayogo dan Prakoso, Djoko, 1987, *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2001, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/437/UPPB/PbB tanggal 16 mei 1975 mengenai pelaksanaan dewan moneter No 53/1962

Surat Edaran Bank Indonesia no 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tentang tata usaha cek atau bilyet giro kosong

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro

Surat Edaran Bank Indonesia No 4/670/UPPB/PbP tanggal 24 Januari tahun 1972
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan